

## PENGARUH PAD, DBH, DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL YANG DIMODERASI OLEH PERTUMBUHAN EKONOMI

**Silfia Megasari**

*silfiamegasari.0925@gmail.com*

**Wahidahwati**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### ABSTRACT

*This research aimed to examine the effect of Local-Owned Source Revenue, Shared Funds, Specific Allocation Funds on Capital Expenditure which with were moderated by Economic Growth of Districts/Cities of East Java Province in Fiscal Year 2016-2020. The research was quantitative with secondary data of Realisation Report of Local State Budget which was taken from the Representative of BPK East Java Province, also a table of Economy Growth rate which was taken from the website of *jatim.bps.go.id*. Moreover, the data collection technique used purposive sampling. In line with that, there were 28 Districts and 9 Cities with a total number of 185 data samples. Furthermore, the data analysis used multiple linear regression with SPSS 26. The research result concluded that Local-Owned Source Revenue, Share Funds and Specific Allocation Funds, partially, had a positive effect on Capital Expenditure. On the other hand, Economic Growth did not affect Capital Expenditure. Additionally, Economic Growth could moderate the effect of Local-Owned Source Revenue and Shared Funds on Capital Expenditure. However, Economic Growth could not moderate the effect of Specific Allocation Funds on Capital Expenditure.*

*Keywords: local-owned sources revenue, shared funds, specific allocation funds, capital expenditure, economic growth*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal yang Dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2016-2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur serta tabel laju pertumbuhan ekonomi yang berasal dari website *jatim.bps.go.id*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* sehingga sampel yang diperoleh yaitu sebanyak 28 Kabupaten dan 9 Kota dengan jumlah data sampel sebanyak 185. Teknik analisis data menggunakan uji regresi linear berganda dengan menggunakan program *Statistical Package for the School Science* (SPSS) versi 26. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus secara parsial memberikan pengaruh positif terhadap Belanja Modal, namun Pertumbuhan Ekonomi tidak memberikan pengaruh terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal, namun Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, belanja modal, pertumbuhan ekonomi

### PENDAHULUAN

Kondisi wilayah Indonesia yang luas dengan penyebaran daerah yang banyak, menyebabkan Pemerintah Pusat mengalami kesulitan dalam mengendalikan dan mengatur segala urusan pemerintahan, hal ini menyebabkan kinerja pemerintahan tidak berjalan efektif, dan memunculkan permasalahan baru yaitu kesenjangan pada daerah. Kesenjangan

tersebut akan menghambat daerah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan mencapai kesejahteraan. Kesenjangan dapat diminimalisir dengan adanya regulasi baru yang mana memberikan perencanaan salah satunya dalam pembangunan daerah dengan mendukung upaya pemerataan pembangunan di Indonesia. Dengan demikian, pembaruan pada system pemerintah diperlukan untuk meringankan beban pekerjaan yang dimiliki pusat sebelumnya. Dengan ditetapkannya sistem desentralisasi sebagai sistem pemerintahan, maka hal ini bertujuan untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri berdasarkan asas otonomi. Hubungan otonomi daerah dan desentralisasi, menjadikan Pemerintah Daerah lebih mandiri dalam mengurus kepentingannya dan mendorong untuk memiliki daya saing atas pencapaian yang dimiliki daerah. Dari pencapaian tersebut menimbulkan hasil kemampuan daerah dalam beberapa hal, salah satunya adalah pengelolaan keuangan daerah yang menjadi sumber utama dalam pembiayaan atas penyelenggaraan pemerintahan.

Seiring berjalannya pelaksanaan desentralisasi, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan kemampuannya dalam mencari sumber pendapatan baru dengan menyesuaikan kekayaan daerah yang dimiliki, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Daerah dalam membiayai pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari daerah tersebut, Pemerintah Pusat juga masih tetap memberikan dana transfer ke Daerah sebagai bentuk dukungan atas penyelenggaraan urusan daerah dengan adanya penyaluran Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana transfer tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik (Mohklas dan Purwati, 2019).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan utama yang diperoleh daerah dengan berdasarkan penggalian potensi-potensi yang dimiliki daerah itu sendiri. Mohklas dan Purwati (2019) menyebutkan bahwa peningkatan PAD diharapkan dapat mendorong akuntabilitas yang baik, memperbaiki pendanaan daerah, dan memperkecil perolehan dana perimbangan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Belanja Modal diartikan sebagai pengeluaran dalam rangka pembentukan modal yang memiliki sifat menambah aset dengan memberikan nilai manfaat lebih dari 12 bulan (Santoso *et al.*, 2021), belanja modal digunakan untuk hal yang memiliki sifat produktif, seperti halnya pembangunan, penambahan infrastruktur dan sarana prasarana publik (Pramudya dan Abdullah, 2021). Selain itu, Pertumbuhan Ekonomi merupakan rangkaian usaha yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka pengangguran, dan meminimalisir ketimpangan pendapatan pada masyarakat (Prabawati dan Wany, 2017), pertumbuhan ekonomi dapat diukur menggunakan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dengan adanya pemaparan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal?, (2) Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal?, (3) Apakah Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal?, (4) Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal?, (5) Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal yang Dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi?, (6) Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal yang Dimoderasi oleh Pertumbuhan

Ekonomi?, (7) Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal yang Dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi?.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka berikut merupakan tujuan penelitian yang ditemukan: (1) Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, (2) Untuk menguji pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal, (3) Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal, (4) Untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal, (5) Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal yang Dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi, (6) Untuk menguji pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal yang Dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi, (7) Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal yang Dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi.

## TINJAUAN TEORITIS

### Teori Keagenan

Teori agensi membahas hubungan antara dua pihak yaitu *principal* dan *agent* (Siagian, 2011:10). *Principal* sebagai pemberi perintah yang bertugas sebagai pengawas, pemberi penilaian, dan pemberi masukan dalam tugas yang dijalankan oleh *agent*. *Agent* sebagai pihak penerima dan yang menjalankan tugas sesuai perintah *principal*. Dalam teori ini, *principal* adalah masyarakat atau publik, sedangkan *agent* adalah Pemerintah Daerah. Sehingga, dapat diartikan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab penuh kepada masyarakat dalam melaksanakan pemerintahannya dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan mengelola sumber daya yang tersedia.

### Otonomi Daerah

Otonomi daerah sebagai usaha dalam memberdayakan suatu daerah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan manajemen sumber daya yang diperoleh berdasarkan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah (Bastian, 2019:2). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah memiliki peran dalam mewujudkan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Prabawati dan Wany, 2017).

### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dana yang diterima daerah dengan diperoleh dari sumber kekayaan setiap daerah (Halim dan Kusufi, 2011:101). Pendapatan tersebut bersumber dari: (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, (4) Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah. Dengan dilaksanakannya desentralisasi, maka daerah memiliki kesempatan dalam menggali dan mengelola pendapatannya untuk penyelenggaraan urusan daerah.

### Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Prabawati dan Wany (2021) menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil adalah pendapatan daerah yang memiliki potensial dan dapat menjadi salah satu modal utama daerah dalam memperoleh dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan lagi diperoleh dari pendapatan lainnya. Dana Bagi Hasil terdiri dari dua sumber, yaitu: (1) Dana Bagi Hasil Pajak, (2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.

### Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang diperoleh dari penerimaan APBN yang ditujukan pada daerah tertentu dengan maksud memberikan bantuan dalam pendanaan terhadap kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan kesesuaian terhadap prioritas nasional (Hutabarat *et al.*, 2021:20). Menurut Santoso *et al.*, (2021), terdiri dari tiga kriteria dalam DAK, antara lain: (1) Kriteria Umum, (2) Kriteria Khusus, (3) Kriteria Teknis.

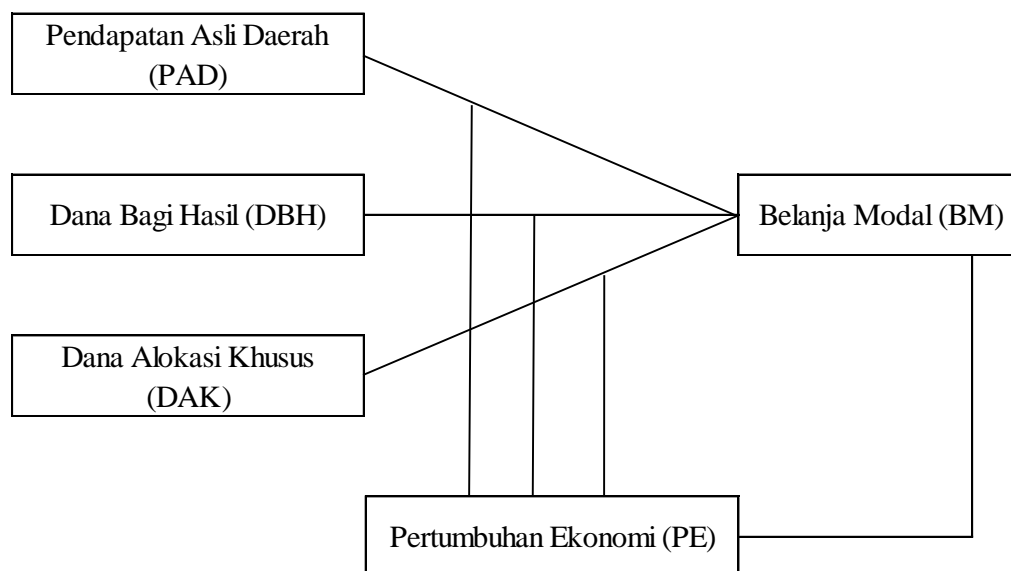
### Belanja Modal (BM)

Halim dan Kusufi (2011:107) menjelaskan bahwa belanja modal adalah anggaran yang dikeluarkan guna memperoleh atau menambah aset tetap dan lainnya dengan kepemilikan nilai manfaatnya selama lebih dari 12 bulan. Menurut Gerungan *et al.* (2016) Belanja Modal dikeluarkan untuk: (1) Belanja tanah, (2) Belanja peralatan dan mesin, (3) Belanja modal gedung dan bangunan, (4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, (5) Belanja aset tetap lainnya.

### Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Pertumbuhan Ekonomi merupakan gambaran suatu daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan pada produksi barang dan jasa (Sinaga *et al.*, 2019). Dengan adanya hasil produksi barang dan jasa yang diperoleh tersebut, maka dapat menambah pendapatan masyarakat dan daerah. Sehingga, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang berperan penting dalam analisis yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi pada suatu negara (Soesilo dan Asyik, 2021).

### Rerangka Pemikiran



Gambar 1  
Rerangka Pemikiran

### Pengembangan Hipotesis

#### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari potensi ekonomi daerah tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. Dapat diartikan bahwa daerah mengeluarkan anggarannya untuk Belanja Modal harus menyesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan

pertimbangan atas PAD yang dimiliki. Penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Fahlevi (2016), Masruroh (2018), Mohklas dan Purwati (2021), Prasetyo dan Rusdi (2021) serta Soesilo dan Asyik (2021) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka ditentukan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

### **Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal**

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang diperoleh dari hasil transfer pusat untuk daerah yang mana penyalurannya berdasarkan angka presentase dengan tujuan mengurangi ketimpangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Dana Bagi Hasil memiliki sifat sebagai *Block Grant* yang berartikan bahwa terdapat kebebasan daerah dalam mengelola dana tersebut dengan menyesuaikan kebutuhan daerah masing-masing Santoso *et al.*, (2021). Sehingga, Dana Bagi Hasil dapat memenuhi kebutuhan daerah dalam menunjang pembangunan daerah dan berdampak pada kesejahteraan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Fahlevi (2016), Jannah *et al.*, (2017), Santoso *et al.*, (2021) serta Prasetyo dan Rusdy (2021) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka ditentukan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal**

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana transfer yang dilakukan pusat untuk daerah sebagai pembiayaan program khusus yang merupakan urusan daerah dan menjadi prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus dikeluarkan untuk pembelanjaan yang memberikan pengaruh atas perkembangan pembangunan sesuai dengan prioritas nasional, sasaran atas belanja tersebut tidak lain untuk memenuhi sarana dan prasarana yang bertujuan memberikan fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh masyarakat dan memberikan pengaruh terhadap meningkatnya pembangunan daerah secara maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh Gerungan *et al.*, (2016), Hidayati (2016), Mohklas dan Purwati (2019), Pramudya dan Abdullah (2021), serta Soesilo dan Asyik (2021) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka ditentukan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal**

Pertumbuhan ekonomi dapat memicu pada peningkatan pendapatan masyarakat, pendapatan tersebut didasari oleh hasil produksi barang dan jasa yang diciptakan masyarakat sebagai gambaran daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari pendapatan masyarakat tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap meningkatnya pendapatan daerah. Dengan meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi, maka daerah memiliki peluang untuk menarik calon investor untuk menanamkan modalnya, sehingga daerah tersebut dapat meningkatkan pendapatannya. Penelitian yang dilakukan oleh Jaeni dan Anggana (2016), Masruroh (2018), Ayem dan Pratama (2018), serta Sari dan Hermanto (2018) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka ditentukan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

### **Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal**

Pertumbuhan ekonomi bermanfaat pada perkembangan dari suatu pembangunan daerah. Keberhasilan atas pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari peran pada pengelolaan

yang baik atas belanja modal yang dialokasikan untuk memenuhi sarana dan prasarana publik. Dengan penunjangan sarana dan prasarana publik diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah, yang mana meningkatnya pendapatan tersebut berkaitan dengan belanja modal yang dikeluarkan. Sehingga, semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka daerah tersebut dapat menarik calon investor dalam menanamkan modalnya. Penelitian yang dilakukan oleh Jaeni dan Anggana (2016), Masruroh (2018), Mahardika dan Riharjo (2019) serta Soesilo dan Asyik (2021) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka ditentukan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>5</sub>: Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

#### **Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal**

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan pendapatan daerah yang berpotensi dan menjadi salah satu modal utama daerah dalam memperoleh dana pembangunan yang nantinya akan dialokasikan untuk belanja daerah dengan tujuan pada penunjangan pembangunan daerah untuk memberikan sarana, prasarana, dan kualitas pelayanan publik yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh Prabawati dan Wany (2017), Pangestika (2017), dan Cahyaning (2018) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi hubungan antara Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka ditentukan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>6</sub>: Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

#### **Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal**

Peningkatan yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung memberikan peningkatan pada hubungan antara sumber dana dan pengeluaran daerah. Hal ini disebabkan sumber dana yang dikeluarkan dialokasikan pada belanja aset yang mana bertujuan untuk memberikan keberhasilan pada pembangunan daerah. Sehingga dengan adanya peningkatan tersebut pada pertumbuhan ekonomi, maka Dana Alokasi Khusus berperan sebagai dana tambahan untuk meningkatkan pelayanan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2016), Mohklas dan Purwati (2019) serta Soesilo dan Asyik (2021) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi hubungan antara Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka ditentukan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>7</sub>: Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Sujarweni (2018:12) mengartikan jenis penelitian tersebut dihasilkan dari temuan yang diperoleh berdasarkan prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi sebagai pengukuran. Populasi menurut Sujarweni (2018:105) adalah jumlah seluruh yang berisi objek atau subjek dengan karakteristik dan kualitas yang ditetapkan penulis untuk penelitian yang memberikan kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur.

#### **Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu adanya kriteria dalam pemilihan sampel agar sesuai dengan tujuan

penelitian. Beberapa kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: (1) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur; (2) Kabupaten/Kota yang terdapat keterbatasan publikasi Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2016-2020. Berdasarkan kriteria tersebut maka penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 37 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 28 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode dokumentasi, dengan mengumpulkan data yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, data tersebut diantaranya Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.

### **Variabel dan Definisi Operasional**

#### **Variabel Terikat (*Dependent Variable*)**

##### **Belanja Modal (BM)**

Belanja Modal (BM) merupakan pengeluaran yang berasal dari anggaran yang memiliki peran untuk mendapatkan atau menambah aset dengan karakteristik nilai manfaat lebih dari 12 bulan yang nantinya menjadi alat daerah untuk menjalankan pelayanan publik. Berikut rumus dalam menghitung BM:

$$\text{BM} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya}$$

#### **Variabel Bebas (*Independent Variable*)**

##### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang dimiliki daerah dengan berdasarkan pada potensi dan kemampuan yang diperoleh dari daerah itu sendiri. Banyak sedikitnya perolehan dari pendapatan ini akan mempengaruhi ketergantungan daerah pada dana yang berasal dari luar daerah. Berikut rumus dalam menghitung PAD:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan} + \text{Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah}$$

##### **Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu dana yang berasal dari APBN yang disalurkan kepada daerah tertentu berdasarkan presentase untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam melaksanakan program desentralisasi. Berikut rumus dalam menghitung DBH:

$$\text{DBH} = \text{Dana Bagi Hasil Pajak} + \text{Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam}$$

##### **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu dana yang berasal dari APBN yang disalurkan kepada daerah tertentu dengan harapan dapat memenuhi biaya atas kegiatan khusus sesuai dengan kepentingan berdasarkan prionritas nasional. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyebutkan bahwa perhitungan DAK yaitu:

$$\text{KKD} = \text{Penerimaan Umum APBD} - \text{Belanja PNSD} \\ (\text{PAD} + \text{DAU} + (\text{DBH} - \text{DBHDR})) - \text{Belanja PNSD}$$

Keterangan:

KKD : Kemampuan Keuangan Daerah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

DBH : Dana Bagi Hasil

DBRDR: Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

PNSD : Pegawai Negeri Sipil Daerah

### Variabel Moderasi (*Moderating Variable*)

#### Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Pertumbuhan Ekonomi (PE) merupakan salah satu indikator makro dalam mengukur kinerja keuangan secara kuantitatif untuk menggambarkan perkembangan perekonomian daerah pada tahun tertentu. Berikut rumus dalam menghitung PE:

$$\text{PE} = \frac{\text{PDRBt} - \text{PDRBt-1}}{\text{PDRBt-1}}$$

Keterangan:

PDRBt : Pendapatan Domestik Regional Bruto Periode Berjalan

PDRBt-1 : Pendapatan Domestik Regional Bruto Periode Tahun Sebelumnya

### Teknik Analisis Data

#### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif diartikan sebagai analisis data yang menggunakan statistik dengan cara menyajikan hasil berupa deskripsi atau penggambaran data yang telah tersedia dengan mengetahui beberapa informasi yang meliputi nilai tertinggi (*maximum*), nilai terendah (*minimum*), nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi.

#### Uji Asumsi Klasik

##### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap variabel residual pada model regresi apakah data yang akan diuji berdistribusi normal atau tidak. Dapat dikatakan baik dan normal apabila hasil uji memenuhi prinsip yang telah ditentukan. Terdapat dua metode dalam pengujian ini, yaitu: (1) Grafik (*Normal P-Plot*), pengujian ini memperhatikan penyebaran titik (data) pada garis diagonal; (2) *Kolmogorov-Smirnov* (Uji K-S), pengujian ini berdasarkan uji statistik non-parametrik. Berikut merupakan ketentuan dalam pengambilan keputusan: (1) Data dikatakan terdistribusi normal, apabila data menyebar pada sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, serta nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* yang menghasilkan nilai  $> 0,05$ ; (2) Data dikatakan tidak terdistribusi normal, apabila data tidak menyebar pada sekitar garis diagonal dan tidak mengikuti garis diagonal, serta nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* yang menghasilkan nilai  $< 0,05$ .

##### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melakukan pengujian apakah model regresi yang ditemukan terdapat korelasi antara variabel bebas. Gejala multikolinearitas dapat diketahui dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Data dapat dinyatakan terbebas dari gejala multikolinearitas, apabila nilai *Tolerance* menunjukkan nilai  $> 0,10$  dan nilai VIF yang bernilai  $< 10$ . Sebaliknya, apabila nilai *Tolerance* bernilai  $< 0,10$  dan nilai VIF  $> 10$ , maka data tersebut dinyatakan terdapat adanya gejala multikolinearitas.



### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk melakukan pengujian apakah model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan periode sebelumnya. Model regresi yang baik aabila terbebas dari gejala autokorelasi. Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, penelitian ini menggunakan uji Runs Test. Dasar pengambilan keputusan atas uji tersebut yaitu apabila *Asymp. Sig (2-tailed)*  $> 0,05$  maka data tersebut menandakan tidak terjadi autokorelasi, sedangkan apabila *Asymp. Sig (2-tailed)*  $< 0,05$  maka data tersebut menandakan terjadi autokorelasi.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melakukan pengujian perbedaan variasi residual pada suatu periode pengamatan ke periode pengamatan lainnya (Sujarweni, 2018:189). Data yang baik adalah data yang mengandung homoskedastisitas atau terbebas dari heteroskedastisitas. Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas, dapat diketahui dengan grafik *scatterplot* dan uji park. Berikut merupakan dasar pengambilan keputusan, yaitu: (1) Terindikasi adanya heteroskedastisitas, apabila penyebaran titik-titik data membentuk suatu pola tertentu dan nilai signifikan yang dihasilkan  $< 0,05$  pada uji park; (2) Terbebas dari heteroskedastisitas, apabila titik-titik data menyebar secara acak atau tidak membentuk pola tertentu dan nilai signifikan yang dihasilkan  $> 0,05$  pada uji park.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk melakukan pengujian dan pengukuran atas kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih yang memaparkan akan hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Adapun bentuk persamaan model regresi yang digunakan:

Persamaan model pertama:

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DBH + \beta_3 DAK + \beta_4 PE + e$$

Persamaan model kedua:

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DBH + \beta_3 DAK + \beta_4 PE + \beta_5 PAD*PE + \beta_6 DBH*PE + \beta_7 DAK*PE + e$$

Keterangan:

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1 - \beta_7$  : Koefisien Regresi

BM : Belanja Modal

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DBH : Dana Bagi Hasil

DAK : Dana Alokasi Khusus

PE : Pertumbuhan Ekonomi

e : Standar Error

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengukur seberapa besar dari berbagai kemampuan model dalam memberika keterangan mengenai variasi variabel terikat (Ghozali, 2018:97). Nilai pada  $R^2$  yang dimiliki terletak pada 0-1. Apabila diketahui nilai  $R^2$  yang kecil, menandakan kemampuan dari variabel bebas tersebut dalam menggambarkan variabel terikat terdapat keterbatasan. Sedangkan, apabila nilai  $R^2$  mendekati satu, maka dapat diartikan bahwa variabel bebas dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi pada variasi variabel terikat.

### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi tersebut layak digunakan atau tidak dalam penelitian dengan melihat tingkat signifikan 0,05 yang mana seluruh variabel bebas dimasukkan dalam model secara bersamaan terhadap variabel dependen. Kriteria dalam pengujian ini, adalah: (1) Data dinyatakan layak, apabila nilai signifikan  $< 0,05$ ; (2) Data dinyatakan tidak layak, apabila nilai signifikan  $> 0,05$ .

### Uji Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menggambarkan seberapa jauh pengaruh antar variabel satu dengan lainnya secara masing-masing dalam menerangkan variabel terikat. Pengujian ini dapat diketahui berdasarkan kriteria sebagai berikut: (1) Nilai signifikan  $< 0,05$  menandakan hasil uji menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan; (2) Nilai signifikan  $> 0,05$  menandakan hasil uji menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan uji yang memberikan informasi berupa gambaran atau deskripsi dari data penelitian pada masing-masing variabel yang meliputi minimum, maximum, mean, dan standar deviasi. Berikut merupakan hasil statistik deskriptif yang disajikan pada Tabel 1:

**Tabel 1**  
Hasil Statistik Deskriptif  
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	185	25,42	29,31	26,5226	,70656
DBH	185	24,49	28,56	25,4434	,66568
DAK	185	24,80	27,11	26,2416	,55389
PE	185	-6,46	21,95	3,7413	3,66824
BM	185	25,06	28,64	26,5890	,59127
Valid N (listwise)	185				

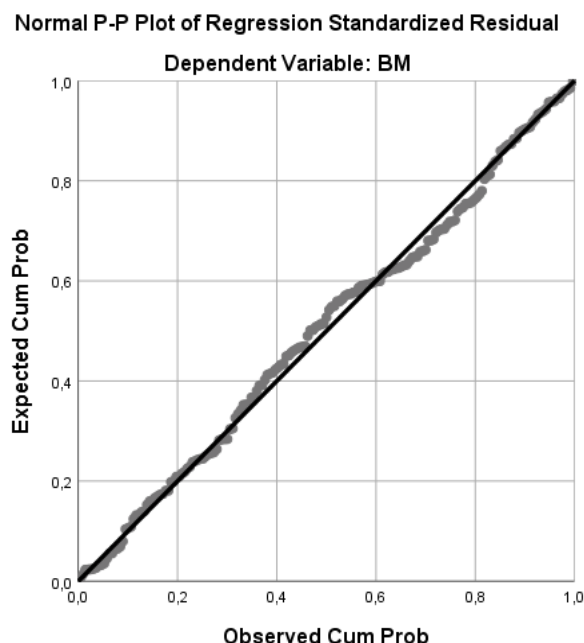
Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan bahwa besarnya data sampel (N) yang digunakan dalam pengujian adalah 185 data. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai terendah 25,42 dan nilai tertinggi 29,31 dengan nilai rata-rata 26,52 dan standar deviasi sebesar 0,70. Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai terendah 24,49 dan nilai tertinggi 28,56 dengan nilai rata-rata 25,44 dan standar deviasi sebesar 0,66. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai terendah 24,80 dan nilai tertinggi 27,11 dengan nilai rata-rata 26,24 dan standar deviasi 0,55. Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai terendah -6,46 dan nilai tertinggi 21,95 dengan nilai rata-rata 3,74 dan standar deviasi sebesar 3,66. Serta Belanja Modal yang memiliki nilai terendah 25,06 dan nilai tertinggi 28,64 dengan nilai rata-rata 26,58 dan standar deviasi sebesar 0,59.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap variabel residual pada model regresi apakah data yang akan diuji berdistribusi normal atau tidak. Berikut merupakan hasil uji normalitas menggunakan grafik:



**Gambar 2**  
**Hasil Uji Normalitas (Grafik)**  
**Sumber: Data sekunder diolah, 2022**

Berdasarkan Gambar 2, menunjukkan titik-titik tersebar pada sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dari hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa data telah berdistribusi normal. Selain melalui uji dengan grafik, uji normalitas juga dapat diketahui dengan menggunakan uji statistik yaitu Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S), hasil pengujian ini dapat diketahui pada tabel berikut ini:

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov Smirnov)**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		185
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,34809430
Most Extreme Differences	Absolute	,041
	Positive	,039
	Negative	-,041
Test Statistic		,041
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

**Sumber: Data sekunder diolah, 2022**

Berdasarkan Tabel 2, menunjukkan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,200, yang mana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikan yaitu 0,05 ( $0,200 > 0,05$ ). Dari hasil uji K-S menandakan bahwa data telah berdistribusi normal. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa data yang diolah telah terdistribusi secara normal dan tidak menyalahi ketentuan, hal ini konsisten dengan hasil uji grafik sebelumnya.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melakukan pengujian apakah model regresi yang ditemukan terdapat korelasi antara variabel Bebas. Uji ini dapat diketahui dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Berikut merupakan hasil uji multikolinearitas:

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
PAD	,483	2,072	Terbebas dari multikolinearitas
DBH	,680	1,471	Terbebas dari multikolinearitas
DAK	,455	2,197	Terbebas dari multikolinearitas
PE	,574	1,741	Terbebas dari multikolinearitas

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan hasil nilai *Tolerance* dan VIF dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai sebesar 0,483 dan 2,072. Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai sebesar 0,680 dan 1,471. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai sebesar 0,455 dan 2,197. Serta Pertumbuhan Ekonomi yang memiliki nilai sebesar 0,574 dan 1,741. Dari hasil masing-masing variabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel bebas, dikarenakan telah memenuhi ketentuan yaitu nilai *Tolerance* > 0,1 dan nilai VIF <10.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk melakukan pengujian apakah model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode sebelumnya. Berikut merupakan hasil uji autokorelasi menggunakan *Runs Test*:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Autokorelasi**  
**Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	,02407
Cases < Test Value	92
Cases >= Test Value	93
Total Cases	185
Number of Runs	87
Z	-,958
Asymp. Sig. (2-tailed)	,338

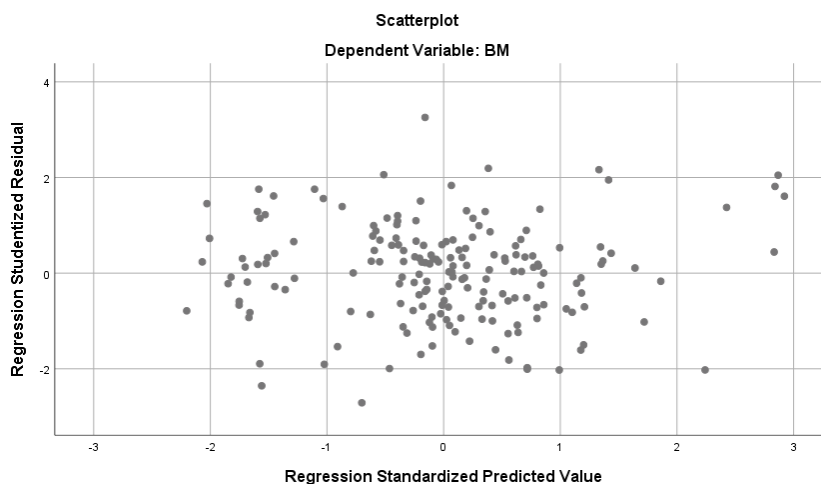
a. Median

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4, menunjukkan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,338, yang mana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikan yaitu 0,05 ( $0,338 > 0,05$ ). Maka, dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari gejala autokorelasi.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melakukan pengujian perbedaan variasi residual pada suatu periode pengamatan ke periode pengamatan lainnya (Sujarweni, 2018:189).



**Gambar 3**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot)**  
Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan Gambar 3, menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak pada posisi penyebaran diatas dan dibawah angka 0 dan sumbu Y dan tidak berkumpul membentuk sebuah pola tertentu. Maka, dari hasil tersebut dapat diindikaasikan bahwa data terbebas dari heteroskedastisitas. Selain menggunakan *scatterplot*, uji heteroskedastisitas juga dapat diketahui dengan uji park, hasil pengujian ini dapat diketahui pada tabel berikut:

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Park)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	-5,438	10,047			-,541	,589
PAD	,341	,333	,108		1,024	,307
DBH	,033	,298	,010		,111	,912
DAK	-,293	,437	-,073		-,669	,504
PE	-,051	,059	-,085		-,872	,384

a. Dependent Variable: LnU2i  
Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 5, menunjukkan hasil signifikan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai sebesar 0,307. Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai sebesar 0,912. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai sebesar 0,504. Dan Pertumbuhan Ekonomi yang memiliki nilai sebesar 0,384. Dari hasil masing-masing variabel tersebut, memiliki nilai lebih besar dari 0,05 (>0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, hasil tersebut konsisten dengan hasil uji yang menggunakan *scatterplot*.

**Analisis Regresi Linear Berganda Model 1**

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk melakukan pengujian dan pengukuran atas kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih yang memaparkan akan hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Persamaan model 1 ini untuk mengetahui pengaruh PAD, DBH, DAK, dan PE terhadap BM. Berikut merupakan hasil analisis regresi linear berganda model 1:

**Tabel 6**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Model 1**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	1,758	1,595		1,102	,272
	PAD	,370	,053	,442	7,000	,000
	DBH	,100	,047	,112	2,109	,036
	DAK	,476	,069	,446	6,856	,000
	PE	-,003	,009	-,018	-,311	,756

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 6, menunjukkan hasil persamaan regresi linear berganda model 1 yang diperoleh sebagai berikut:

$$BM = 1,758 + 0,370PAD + 0,100DBH + 0,476DAK - 0,03PE + e$$

Pada persamaan diatas maka dapat diketahui bahwa: (1) Nilai konstanta sebesar 1,758, (2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) menghasilkan koefisien regresi 0,370 yang menunjukkan arah positif antara PAD terhadap BM, (3) Dana Bagi Hasil (DBH) menghasilkan koefisien regresi 0,100 yang menunjukkan arah positif antara DBH terhadap BM, (4) Dana Alokasi Khusus (DAK) menghasilkan koefisien regresi 0,476 yang menunjukkan arah positif antara DBH terhadap BM, (5) Pertumbuhan Ekonomi (PE) menghasilkan koefisien regresi -0,03 yang menunjukkan arah negatif antara PE terhadap BM.

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) bertujuan untuk mengukur seberapa besar dari berbagai kemampuan model dalam memberikan keterangan mengenai variasi variabel terikat (Ghozali, 2018:97). Berikut merupakan hasil uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) model 1:

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) Model 1**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,808 <sup>a</sup>	,653	,646	,35194

a. Predictors: (Constant), PE, PAD, DBH, DAK

b. Dependent Variable: BM

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 7, menunjukkan nilai *R Square* sebesar 0,653. Dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh sebesar 65,3% yang berasal dari variabel bebas yakni: PAD, DBH, DAK, dan PE terhadap BM. Sedangkan selisih 34,7% dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya yang tidak diuji pada penelitian ini.

### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi tersebut layak digunakan atau tidak dalam penelitian. Berikut merupakan hasil Uji F model 1:

**Tabel 8**  
**Uji Kelayakan Model (Uji F) Model 1**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	42,031	4	10,508	84,834	,000 <sup>b</sup>
	Residual	22,295	180	,124		
	Total	64,326	184			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), PE, PAD, DBH, DAK

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 8, menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini layak untuk digunakan. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 84,834 dan nilai signifikan sebesar 0,00, yang mana nilai tersebut kurang dari tingkat signifikan yaitu 0,05 ( $0,00 < 0,05$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (PAD, DBH, DAK, PE) yang dijelaskan memberikan pengaruh secara bersamaan terhadap variabel terikat (BM).

### Uji Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menggambarkan seberapa jauh pengaruh antar variabel satu dengan lainnya secara masing-masing dalam menerangkan variabel terikat. Berikut merupakan hasil Uji t model 1:

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t) Model 1**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1,758	1,595			1,102	,272
	PAD	,370	,053	,442		7,000	,000
	DBH	,100	,047	,112		2,109	,036
	DAK	,476	,069	,446		6,856	,000
	PE	-,003	,009	-,018		-,311	,756

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 9, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 yang menandakan nilai signifikansinya  $0,000 < 0,05$ . Hasil tersebut memberikan arti bahwa Pendapatan Asli Daerah memberikan pengaruh terhadap Belanja Modal, maka  $H_1$  diterima.

Dana Bagi Hasil (DBH) memperoleh nilai signifikan sebesar 0,036 yang menandakan nilai signifikansinya  $0,000 < 0,05$ . Hasil tersebut memberikan arti bahwa DBH memberikan pengaruh terhadap Belanja Modal, maka  $H_2$  diterima.

Dana Alokasi Khusus (DAK) memperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 yang menandakan nilai signifikansinya  $0,000 < 0,05$  (BM). Hasil tersebut memberikan arti bahwa Dana Alokasi Khusus memberikan pengaruh terhadap Belanja Modal, maka  $H_3$  diterima.

Pertumbuhan Ekonomi (PE) memperoleh nilai signifikan sebesar 0,756 yang menandakan nilai signifikansinya  $0,756 > 0,05$ . Hasil tersebut memberikan arti bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak memberikan pengaruh terhadap Belanja Modal, maka  $H_4$  ditolak.

### Analisis Regresi Linear Berganda Model 2

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk melakukan pengujian dan pengukuran atas kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih yang memaparkan akan hubungan

variabel bebas dan variabel terikat. Persamaan model 2 ini untuk mengetahui pengaruh PAD, DBH, DAK, PE, PAD\*PE, DBH\*PE, dan DAK\*PE terhadap BM. Berikut merupakan hasil analisis regresi linear berganda model 2:

**Tabel 10**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Model 2**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	4,329	1,714			2,526	,012
	PAD	,498	,057	,595		8,761	,000
	DBH	-,052	,063	-,059		-,828	,409
	DAK	,394	,074	,369		5,303	,000
	PE	-,157	,361	-,971		-,434	,665
	PAD*PE	-,062	,011	-10,233		-5,430	,000
	DBH*PE	,045	,013	7,174		3,629	,000
	DAK*PE	,025	,015	4,053		1,663	,098

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 10, menunjukkan hasil persamaan regresi linear berganda model 2 yang diperoleh sebagai berikut:

$$BM = 4,329 + 0,498PAD - 0,052DBH + 0,394DAK - 0,157PE - 0,062PAD*PE + 0,045DBH*PE + 0,025DAK*PE$$

Pada persamaan diatas maka dapat diketahui bahwa: (1) Nilai konstanta sebesar 4,329, (2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) menghasilkan koefisien regresi 0,498 yang menunjukkan arah positif antara PAD terhadap BM, (3) Dana Bagi Hasil (DBH) menghasilkan koefisien regresi -0,052 yang menunjukkan arah negatif antara DBH terhadap BM, (4) Dana Alokasi Khusus (DAK) menghasilkan koefisien regresi 0,394 yang menunjukkan arah positif antara DBH terhadap BM, (5) Pertumbuhan Ekonomi (PE) menghasilkan koefisien regresi -0,157 yang menunjukkan arah negatif antara PE terhadap BM, (6) PAD\*PE menghasilkan koefisien regresi -0,62 yang menunjukkan arah negatif antara PAD\*PE terhadap BM, (7) DBH\*PE menghasilkan koefisien regresi 0,045 yang menunjukkan arah positif antara DBH\*PE terhadap BM, (8) DAK\*PE menghasilkan koefisien regresi 0,025 yang menunjukkan arah positif antara DAK\*PE terhadap BM.

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) bertujuan untuk mengukur seberapa besar dari berbagai kemampuan model dalam memberika keterangan mengenai variasi variabel terikat (Ghozali, 2018:97). Berikut merupakan hasil uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) model 2:

**Tabel 11**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) Model 2**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,840 <sup>a</sup>	,706	,694	,32683

a. Predictors: (Constant), DAK\*PE, PAD, DBH, DAK, DBH\*PE, PAD\*PE, PE

b. Dependent Variable: BM

Sumber: Data sekunder diolah, 2022



Berdasarkan Tabel 11, menunjukkan nilai *R Square* sebesar 0,706. Dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh sebesar 70,6% yang berasal dari variabel bebas yakni: PAD, DBH, DAK, PE, PAD\*PE, DBH\*PE, dan DAK\*PE terhadap BM. Sedangkan selisih 29,4% dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya yang tidak diuji pada penelitian ini.

**Uji Kelayakan Model (Uji F)**

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi tersebut layak digunakan atau tidak dalam penelitian. Berikut merupakan hasil Uji F model 2:

**Tabel 12**  
**Uji Kelayakan Model (Uji F) Model 2**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	45,420	7	6,489	60,745	,000 <sup>b</sup>
	Residual	18,906	177	,107		
	Total	64,326	184			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), DAK\*PE, PAD, DBH, DAK, DBH\*PE, PAD\*PE, PE

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 12, menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini layak untuk digunakan. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 60,745 dan nilai signifikan sebesar 0,00, yang mana nilai tersebut kurang dari tingkat signifikan yaitu 0,05 ( $0,00 < 0,005$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (PAD, DBH, DAK, PE, PAD\*PE, DBH\*PE, dan DAK\*PE) yang dijelaskan memberikan pengaruh secara bersamaan terhadap variabel terikat (BM).

**Uji Parsial (Uji t)**

Uji t bertujuan untuk menggambarkan seberapa jauh pengaruh antar variabel satu dengan lainnya secara masing-masing dalam menerangkan variabel terikat. Berikut merupakan hasil Uji t model 2:

**Tabel 13**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t) Model 2**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,329	1,714		2,526	,012
	PAD	,498	,057	,595	8,761	,000
	DBH	-,052	,063	-,059	-,828	,409
	DAK	,394	,074	,369	5,303	,000
	PE	-,157	,361	-,971	-,434	,665
	PAD*PE	-,062	,011	-10,233	-5,430	,000
	DBH*PE	,045	,013	7,174	3,629	,000
	DAK*PE	,025	,015	4,053	1,663	,098

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 13, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah\*Pertumbuhan Ekonomi (PAD\*PE) memperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 yang menandakan nilai signifikansinya  $0,000 < 0,05$ . Hasil tersebut memberikan arti bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi hubungan pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, maka  $H_5$  diterima.

Dana Bagi Hasil\*Pertumbuhan Ekonomi (DBH\*PE) memperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 yang menandakan nilai signifikansinya  $0,000 < 0,05$ . Hasil tersebut memberikan arti bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi hubungan pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal, maka  $H_6$  diterima.

Dana Alokasi Khusus\*Pertumbuhan Ekonomi (DAK\*PE) memperoleh nilai signifikan sebesar 0,098 yang menandakan nilai signifikansinya  $0,098 > 0,05$ . Hasil tersebut memberikan arti bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal, maka  $H_7$  ditolak.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) dan koefisien regresi sebesar 0,370. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh maka Belanja Modal pula akan mengalami peningkatan. Dikarenakan pendapatan ini memiliki pengaruh terhadap aktivitas belanja modal, dimana anggaran yang dikeluarkan untuk belanja modal telah disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan pendapatan yang diterima. Sehingga pemaksimalan pendapatan dapat memberikan pengaruh pada perolehan aset sebagai bentuk pelaksanaan pembangunan daerah, dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan tersebut berasal dari alokasi belanja modal yang telah dikeluarkan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Susanti dan Fahlevi (2016), Masruroh (2018), Mohklas dan Purwati (2021), Prasetyo dan Rusdi (2021) serta Soesilo dan Asyik (2021). Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima.

### **Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, diperoleh hasil bahwa Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,036 kurang dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) dan koefisien regresi sebesar 0,100. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Bagi Hasil yang diperoleh maka Belanja Modal pula akan mengalami peningkatan. Dana ini memiliki peran penting sebagai salah satu sumber dana tambahan dalam memperoleh aset, dikarenakan memiliki sifat *block grant* yang berartikan terdapat kebebasan atas pengalokasian dana. Dalam penelitian ini diketahui bahwa adanya kontribusi dari DBH dalam memenuhi kebutuhan daerah yang dialokasikan kepada pembelanjaan modal. Maka dapat dikatakan bahwa dana ini bermanfaat pada tujuan adanya pemberian DBH kepada suatu wilayah yaitu untuk meningkatkan pemerataan wilayah diantaranya pemenuhan kebutuhan dalam proses pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat nanti. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Susanti dan Fahlevi (2016), Jannah *et al.*, (2017), Santoso *et al.*, (2021) serta Prasetyo dan Rusdy (2021). Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  diterima.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, diperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) dan koefisien regresi sebesar 0,476. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Khusus yang diperoleh maka Belanja Modal pula akan mengalami peningkatan. DAK sebagai dana yang diterima daerah untuk pendanaan kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan menjadi prioritas nasional. Maka ketepatan dalam penyaluran dana akan memberikan pengaruh pada keberhasilan daerah dalam memenuhi kebutuhan dan urusan daerah yang menjadi prioritas

nasional. Pengalokasian DAK tetap dibutuhkan untuk menjadi salah satu sumber dana yang diharapkan mampu memberikan perubahan melalui adanya belanja aset. Pemanfaatan DAK yang maksimal menjadi penting dalam upaya daerah dalam meningkatkan kualitas publik, dengan ini akan mempengaruhi perkembangan pembangunan daerah yang lebih merata dan dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Gerungan *et al* (2016), Hidayati (2016), Pramudya dan Abdullah (2021), Mohklas dan Purwati (2019) serta Soesilo dan Asyik (2021). Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  diterima.

### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, diperoleh hasil bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Dibuktikan dengan nilai signifikan 0,756 lebih besar dari 0,000 ( $0,756 > 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh antara dua variabel tersebut. Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator dalam meningkatkan kemampuan daerah memberikan pengaruh atas pendapatan dan berjalannya pembangunan daerah. Keberhasilan tersebut tidak dipisahkan dari alokasi belanja modal, dimana penambahan aset dapat menunjang daerah untuk memberikan pertumbuhan ekonomi yang baik. Namun hasil penelitian ini menunjukkan sebaliknya, bahwa pengalokasian dana daerah belum sepenuhnya dikeluarkan untuk belanja modal melainkan belanja lainnya. Yang mana belanja tersebut tidak memberikan pengaruh banyak terhadap pembangunan daerah dan kualitas pelayanan publik. Dengan kata lain pengalokasian tersebut menyebabkan kurangnya pengadaan aset yang memiliki manfaat sebagai kelangsungan dalam memperoleh barang dan jasa. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Masruroh (2018), Ayem dan Pratama (2018), serta Sari dan Hermanto (2018) namun sejalan dengan Harun dan Handayani (2021). Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa  $H_4$  ditolak.

### **Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, diperoleh hasil bahwa Pertumbuhan Ekonomi memoderasi namun memperlemah pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05 ( $0,00 < 0,05$ ) dan koefisien regresi sebesar -0,62. Pertumbuhan ekonomi yang memperlemah hubungan tersebut, menandakan bahwa penggunaan pendapatan daerah tersebut dikeluarkan untuk belanja lain selain belanja modal, dimana pengeluaran belanja lain lebih besar dari belanja modal. Dapat diartikan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi suatu daerah telah mengalami peningkatan, maka daerah tersebut mengalokasikan pendapatannya untuk belanja lainnya, sehingga terjadi pengurangan alokasi pada pembelanjaan modal karena daerah tersebut sebelumnya telah memenuhi peningkatan pada pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan Jaeni dan Anggana (2016), Masruroh (2018), Mahardika dan Riharjo (2019) serta Soesilo dan Asyik (2021). Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa  $H_5$  diterima.

### **Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, diperoleh hasil bahwa Pertumbuhan Ekonomi memoderasi namun memperkuat pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. Dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) dan koefisien regresi sebesar 0,045. Dana Bagi Hasil menjadi modal utama dan penunjang daerah dalam melakukan pengeluaran daerah khususnya untuk memenuhi sarana, prasarana publik serta pembangunan daerah. Hasil dari pengeluaran daerah tersebut tidak luput untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan tercapai apabila pembangunan daerah dilakukan sesuai sasaran serta dapat

berjalan secara efektif dan efisien dengan pengalokasian dana yang tepat. Hasil penelitian ini sejalan dengan Prabawati dan Wany (2017), Pangestika (2017), dan Cahyaning (2018). Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa  $H_6$  diterima.

### **Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, diperoleh hasil bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. Dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,098 lebih besar dari 0,05 ( $0,098 > 0,05$ ). Hal ini disebabkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang digambarkan sebagai hasil produksi barang dan jasa dimana hasil produksi tersebut memberikan pengaruh atas pendapatan yang diterima. Dana Alokasi Khusus sebagai dana tambahan yang diberikan kepada daerah untuk melakukan pendanaan secara khusus dimana alokasi tersebut ditujukan pada urusan daerah yang menjadi prioritas nasional, maka pengalokasian dana tersebut telah diatur oleh pemerintah pusat dan tidak seluruhnya dana tersebut digunakan untuk pembelanjaan modal karena pertumbuhan ekonomi tidak menjadi faktor utama dalam pemanfaatan dana tersebut.. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Hidayati (2016), Mohklas dan Purwati (2019) serta Soesilo dan Asyik (2021) namun sejalan dengan Sari dan Wirama (2018) serta Widiasmara (2019). Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa  $H_7$  ditolak.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, (2) Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, (3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, (4) Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, (5) Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, (6) Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal, (7) Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran untuk penelitian berikutnya, yaitu: (1) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan populasi yang lebih umum lagi dengan skala nasional yaitu Pemerintah Daerah di Indonesia, (2) Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam menggali pendapatan baru dengan mengoptimalkan kekayaan yang dimiliki daerah dari hasil pemanfaatan belanja modal (aset).

### **Keterbatasan**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: (1) Sampel penelitian yang kurang lengkap, sehingga tidak mencakup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, (2) Variabel bebas yang digunakan hanya tiga yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus, sedangkan variabel terikat dan variabel moderasi yang digunakan hanya satu yaitu Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ayem, S. dan D. D. Pratama. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. *Akuntansi Dewantara* 2(2): 169-182.

- Badan Pusat Statistik. 2020. *Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota (persen) 2014-2018*. Februari. BPS Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- \_\_\_\_\_. 2021. *Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (persen) 2017-2020*. Mei. BPS Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Bastian, I. 2019. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Cahyaning, S. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel *Moderating* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan* 3(1): 1-38.
- Gerungan, H. P., D. P. E. Saerang, dan V. Ilat. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing* 8(1): 233-245.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. dan M. S. Kusufi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat. Salemba Empat. Jakarta.
- Harun. M. G. dan N. Handayani. 2021. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAK, DAU dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 10(4): 1-19.
- Hidayati, N. 2016. Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *e-Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Hutabarat, D. D., W. Winarno, dan R. Diananto. 2021. *Manajemen Keuangan Anggaran Transfer ke Daerah pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*. Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Jaeni dan Anggana. 2016. Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers UNISBANK*: 692-702.
- Jannah, R., B. Wahono, dan M. A. Salim. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus Pemerintahan Kabupaten Gresik Periode 2009-2015). *Warta Ekonomi* 07(17): 123-131.
- Mahardika, S. A. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8(11): 1-16.
- Masruroh, A. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. *Simki-Economic* 02(01): 02-15.
- Mohklas dan D. I. Purwati. 2019. Memoderasikah Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal? (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2016). *STABILITY: Journal of Management & Business* 2(1): 1-19.
- Pangestika, W. 2017. Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil pada Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*. 06 Maret 2019. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. 09 Desember 2005. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Jakarta.
- Prabawati, P. S. S. dan Wany, E. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel *Moderating* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. *Equilibrium*: 01-17.
- Pramudya, F. K. dan M. F. Abdullah. 2021. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Belanja Modal. *INOVASI* 17(4):653-660.
- Prasetyo, D. A. dan D. Rusdi. 2021. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula* 5: 48-75.
- Santoso, S. F., S. Bantasyam, dan S. B. Astuti. 2021. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila* 1(2): 94-105.
- Sari, D. M. M. Y. dan D. G. Wirama. 2018. Pengaruh PAD, DAU dan DAK pada Alokasi Belanja Modal dengan Pendapatan Per Kapita sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 22 (3): 2065-2087.
- Sari, I. N. dan S. W. Hermanto. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 7(12): 1-19.
- Siagian, Sondang P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Soesilo, A. F. dan N. F. Asyik. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Bantuan Provinsi, dan Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 10(4): 1-21.
- Sujarweni, V. W. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Susanti, S. dan H. Fahlevi. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh). *JIMEKA* 1(1): 183-191.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- Widiasmara, A. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total dan Luas Wilayah, terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel *Moderating*. *JIFA* 2(1): 45-46.